

ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN

Agus Subagyo

Universitas Jenderal Achmad Yani

Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531

Alamat email Koresponden: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

The era of globalization has created a complex threat, both military, non-military, and hybrid threats, thus encouraging Indonesia to compile a universal defense system with the formation of main components, reserve components, and supporting components, which are prepared early through territorial guidance at every Kodam throughout Indonesia. The purpose of this study was to analyze territorial development at the Military Regional Command III / Siliwangi to support the universal defense system in order to face the nature of the threat. The theoretical framework used is the concept of territorial development, the concept of threats, and the concept of military and non-military defense. The research method uses qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature study. The results showed that territorial development at Military Regional Command III / Siliwangi was carried out quite optimally by development geography, development demographics, and development social conditions, which were carried out through social communication methods, development of regional resilience, and military service. The obstacles faced in carrying out territorial development at the Military Regional Command III / Siliwangi are internal constraints (personnel, budget, infrastructure, software) and external constraints (misunderstanding of the community, local government sectoral egos, and NGO's negative perceptions). The innovative idea of territorial development is the need for a permit on Defense Environmental Impact Analysis and building an application / software for the Indonesian Army Teritorial Management Information System.

Keywords: analysis, threats, defence, territorial.

ABSTRAK

Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehingga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep

pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / *software* Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.

Kata Kunci: Analisis, Ancaman, Pertahanan, Teritorial.

PENDAHULUAN

Dalam spektrum sosial politik, masalah pertahanan dan keamanan merupakan aspek vital yang menarik untuk dikaji dan dianalisis. Salah satu tujuan negara adalah menciptakan keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya sehingga akan mendukung terselenggaranya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Urusan pertahanan dan keamanan merupakan urusan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah pusat berupaya untuk melakukan tata kelola pertahanan (*defence governance*) yang profesional agar supaya mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari segala ancaman yang akan menganggu aktifitas kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif yuridis, UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok, TNI menggelar operasi, yakni: Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas OMSP adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Pada bagian penjelasan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah : (1) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (2) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sementara itu, UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan mentransformasikan sumber daya nasional (berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional) menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan. Sebagai salah satu matra utama di satuan TNI, satuan TNI AD melaksanakan fungsi pembinaan teritorial melalui satuan komando teritorial (Koter) atau satuan komando kewilayahan (Kowil) di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Kodam, Korem, Kodim, sampai dengan Koramil.

Salah satu Kodam yang saat ini terus melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial adalah Kodam III/Siliwangi. Kodam III/Siliwangi membawahi 2 (dua) wilayah Propinsi, yakni Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten yang sangat strategis karena merupakan wilayah penyangga ibu kota

Jakarta dengan dinamika permasalahan sosial yang komplek dan beragam. Markas Kodam III/Siliwangi berada di Kota Bandung yang membawahi 4 (empat) Korem dan 22 (duapuluhan dua) Kodim, yang merupakan satuan komando teritorial dengan jangkauan sampai dengan di tingkat kecamatan dan kelurahan / desa, dimana terdapat Babinsa di setiap desa / kelurahan. Kodam III/Siliwangi memiliki peranan yang sangat strategis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai dengan menumbangkan berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia.

Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi selama ini belum sepenuhnya optimal, dilihat dari fungsi pembinaan teritorial dan metode pembinaan teritorial. Pada aspek fungsi pembinaan teritorial, pembinaan dilakukan melalui pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang dijalankan oleh Kodam bersama dengan institusi Korem, Kodim, dan Koramil yang ada dibawahnya untuk mentransformasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional menjadi sumber daya pertahanan yang akan menjadi kekuatan pertahanan dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun non militer. Pada aspek metode pembinaan teritorial, digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI, yang dilakukan oleh semua aparat Kodam III/Siliwangi kepada semua lapisan masyarakat dan komponen bangsa lainnya.

Pelaksanaan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi masih bersifat konvensional dan manual, belum mengadaptasi perkembangan teknologi informasi, belum menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis, dan belum menerapkan digitalisasi perangkat aplikasi (*software*) teknologi di era revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, aparat babinsa dalam komunikasi sosial dengan masyarakat, masih menggunakan alat komunikasi Hand Phone (HP) yang belum *smart phone*, masih “gaptek” media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube), dan alat transportasi yang serba terbatas dihadapkan pada jangkauan wilayah tugas sampai ke

kampung-kampung, pedalaman, pegunungan, dan pesisir. Di setiap Kodim maupun Koramil juga tidak ada *website* resmi Kodam, Korem, Kodim maupun Koramil sebagai sarana untuk menyampaikan sosialisasi program dan kegiatan pembinaan teritorial kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat juga belum memahami apa itu pembinaan teritorial dan apa manfaat keberadaan Kodam III/Siliwangi bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini adalah bahwa sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian lain yang mengkaji tentang pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi sehingga originalitas, kebaruan, dan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berkontribusi pada khazanah pustaka di bidang tata kelola pemerintahan (*governance and state*), khususnya kebijakan publik di bidang pertahanan dan keamanan, terutama yang berkenaan dengan kebijakan pembinaan teritorial TNI AD di Kodam III/Siliwangi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan makna dibalik fenomena, peristiwa, atau fakta. Artinya, penelitian kualitatif akan menganalisis makna dibalik data untuk menjawab sebuah peristiwa yang terjadi dengan penekanan pada penafsiran, pemaknaan, dan keyakinan yang dituangkan dalam bentuk kata, kalimat, dan narasi, serta bukan mengukur secara kalkulasi matematik-statistik atau angka sebagaimana penelitian kualitatif (Sugiono, 2018: 6-8). Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan atau studi terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi TNI AD termasuk Kodam III/Siliwangi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data, sehingga data dapat dibaca dan ditampilkan secara sistematis, mudah dipahami, dan memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas (Miles & Huberman, 2013: 17-20).

Observasi dilakukan di Markas Kodam III/Siliwangi yang berada di Kota Bandung selama 2 bulan, yakni pada Bulan Februari dan Maret 2020, khususnya di jajaran Asisten Teritorial (Aster) Kodam III/Siliwangi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan, yakni Pangdam III/Siliwangi, Kasdam III/Siliwangi, dan Aster Kodam III/Siliwangi pada bulan Juni 2020. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Kodam III/Siliwangi, seperti Lapsat Kodam III/Siliwangi, Progbinter Kodam III/Siliwangi, Sisrendal Binter Kodwam III/Siliwangi, Anpotwil Kodam III/Siliwangi, dan Analisa Daerah Operasi (ADO) Kodam III/Siliwangi.

KERANGKA TEORITIS

Pisau analisis untuk menganalisis dan membedah pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi, dipakai kerangka teoritis-konseptual, yakni konsep ancaman, konsep pertahanan militer, konsep pertahanan nir militer, dan konsep pembinaan teritorial.

Menurut Alfred Sthepan (1971:10), ancaman secara universal dibagi menjadi ancaman militer dan ancaman non militer. Barry Posen (1994:7-9) mengatakan bahwa ancaman bisa berasal dari dalam negeri (internal) dan ancaman dari luar negeri (eksternal). Barry Buzan (1991:19-20) menjabarkan bahwa ancaman bisa berupa ancaman militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari konsep inilah kemudian UNDP memunculkan konsep human security yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yakni: *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security dan political security* (Subianto, 2013:21-38). Ancaman keamanan mengalami perluasan makna sehingga lahir lima dimensi konsep keamanan, yakni: (1) *the origin of threats*; (2) *the nature of threats*; (3) *changing reponse*; (4) *changing responsibility of security*; (5) *core value of security* (Perwita, 2014:44-62).

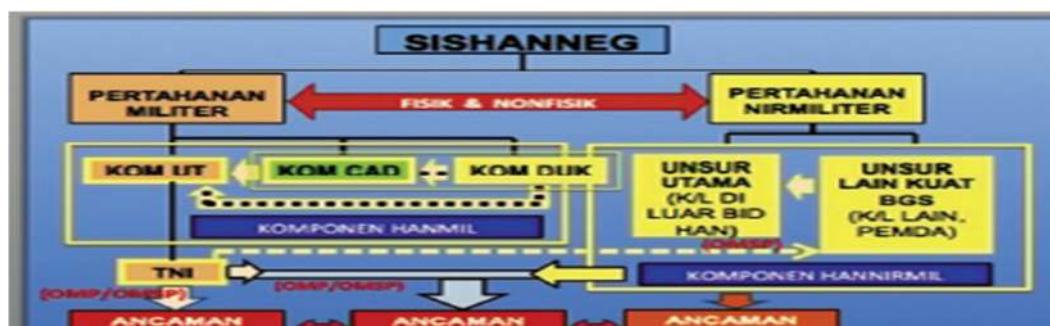
Dalam konteks Indonesia, Buku Putih Pertahanan RI Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI dan UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Untuk Pertahanan Negara

menyatakan bahwa ancaman meliputi ancaman militer, non militer, dan hibrida.

Gambar 1. Hakekat Ancaman

Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut (Salman, 2019:17-35). Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Gambar 2. Sistem Pertahanan Negara

Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015

Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas pertahanan Negara (Susetyo, 2019: 1-18). Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara.

Gambar 3. Skema Pengintegrasian Komponen Hanmil & Han Nirmil



Sumber : Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015

Sumber daya pertahanan militer merupakan hasil transformasi dari kekuatan komponen pertahanan militer yang terbentuk dari beberapa kekuatan pertahanan negara, meliputi Komponen Utama yang diperkuat dengan Komponen Cadangan dan Pendukung.

Gambar 4. Komponen Pertahanan Nirmiliter

Sumber: Kemhan RI. Buku Putih Pertahanan RI. 2015

Melihat hakekat ancaman (militer, non militer, hibrida), dirumuskan strategi pertahanan semesta (pertahanan militer, pertahanan nirmiliter), yang dilakukan melalui penyiapan potensi pertahanan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan melalui pembinaan teritorial oleh TNI AD di satuan komando kewilayahan / satuan teritorial di setiap Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka kepentingan pertahanan negara (Mabes TNI AD, 2017:53). Pembinaan teritorial TNI AD diimplementasikan dalam fungsi pembinaan teritorial dan metode pembinaan teritorial, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Fungsi & Metode Pembinaan Teritorial TNI AD

Binter TNI AD	
Fungsi Binter TNI AD	Metode Binter TNI AD
Pembinaan Geografi	Komunikasi Sosial
Pembinaan Demografi	Pembinaan Ketahanan Wilayah
Pembinaan Kondisi Sosial	Bhakti TNI

Sumber: Mabes TNI AD. Buku Petunjuk Teritorial. 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi

Sebagai satuan komando kewilayahan yang memiliki wilayah yang sangat luas, meliputi dua propinsi, penyangga ibu kota Jakarta, dengan dinamika kehidupan sosial yang sangat komplek, plural, dan majemuk, Kodam III/Siliwangi berupaya melakukan fungsi pembinaan teritorial terhadap potensi pertahanan berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan, yang digelar melalui pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial, berikut ini:

a. Pembinaan Geografi:

Pembinaan geografi yang dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi meliputi pendataan terhadap luas wilayah, letak geografis, tipologi wilayah, kontur wilayah, maupun topografi daerah. Aparat Kodam III/Siliwangi melakukan pemetaan wilayah potensi wilayah, kekayaan alam di wilayah, serta membuat perencanaan wilayah pertahanan berdasarkan kondisi geografis wilayah. Dibuat pula Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat (RTRW Han Rat) yang membagi wilayah menjadi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan untuk menggelar perang gerilya atau perang berlarut apabila musuh memasuki wilayah jantung pertahanan.

Wawancara dengan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto, menyatakan bahwa pembinaan geografi dilakukan oleh semua aparat teritorial di wilayah Kodam III/Siliwangi, baik di Korem, Kodim, maupun Koramil dengan ujung tombak adalah Babinsa yang ada di setiap kelurahan / desa untuk mendata potensi geografi, memetakan topografi wilayah, dan mencatat bangunan maupun tanah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pertahanan Negara, khususnya dalam menyusun RTRW Pertahanan Darat sehingga

terpetakan daerah logistic pertahanan untuk mensuplai pasukan jika perang terjadi. Berikut ini kutipan wawancara dengan Pangdam III/Siliwangi :

“Dalam melaksanakan pembinaan geografi, aparat kewilayahan Kodam III/Siliwangi yang tergelar dari Korem, Kodim sampai dengan Koramil melakukan pendataan, pemetaan, pemutkhiran, dan pencatatan semua potensi geografi, bangunan, tanah, pegunungan, lembah, bukit, sungai, danau, waduk, jalan, jembatan, maupun kawasan perkebunan, kawasan pertanian, maupun kawasan peternakan, yang kemudian dianalisis sebagai sumber daya pertahanan yang dapat menjadi modal sebagai kekuatan pertahanan bila terjadi perang dengan Negara lain maupun menghadapi ancaman militer lainnya. Semua aspek geografi dianggap sebagai medan peperangan sehingga perlu dikenali, diketahui, dan dikuasai karakteristik dan topografinya sehingga akan menjadi kekuatan tempur saat melawan musuh. Penguasaan wilayah, teritorial, dan medan kewilayahan sangat penting sebagai bekal dalam menyusun RTRW Pertahanan Darat yang akan digelar saat perang terjadi”.

b. Pembinaan Demografi

Pembinaan demografi dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi dengan kegiatan pendataan terhadap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan tingkat pendidikan. Pencatatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh adat, tokoh agama, linmas, ratih, hansip, karma, polsus, ormas, dan LSM juga dilakukan secara rutin setiap tahun melalui aparat Babinsa dan aparat teritorial di wilayahnya masing-masing, bekerjasama dengan aparat pemda maupun BPS di Kabupaten/Kota. Pendataan dan pencatatan terhadap penduduk, masyarakat maupun semua aktifitas masyarakat untuk melihat potensi warga Negara untuk direkrut, dididik, dilatih, dan dimasukan dalam komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara.

Wawancara dengan Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, dapat disimpulkan bahwa pembinaan demografi sangat penting untuk rencana pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung yang akan mendukung komponen utama (TNI) dalam menggelar operasi militer untuk perang (OMP) sehingga perlu disiapkan secara dini, dilatih secara rutin, dan dididik secara konsisten serta siap untuk dimobilisasi saat terjadi peperangan. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Kasdam III/Siliwangi:

“Pembinaan demografi diarahkan untuk melatih, mendidik, dan membina semua potensi sumber daya manusia, masyarakat, maupun warga Negara seperti pramuka, karang taruna, menwa, OKP, Linmas, Hansip, Ratih, Polsus, dan lain-lain. Pembinaan demografi penting dilakukan karena sistem pertahanan semesta yang dianut oleh bangsa Indonesia, dimana setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam urusan pertahanan Negara dengan menjadi komponen cadangan maupun komponen pendukung yang disiapkan, dibina, dilatih dan dirancang secara sistematis untuk membantu TNI sebagai komponen utama melawan musuh dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai, komponen cadangan dan komponen pendukung bekerja sesuai profesi masing-masing dan secara berkala dilatih melalui pendidikan dasar kemiliteran, namun saat terjadi perang maka komponen cadangan dan komponen pendukung ditugaskan, digelar atau dimobilisasi untuk membantu komponen utama, yakni TNI, melawan musuh, sesuai dengan tugasnya masing-masing yang diatur sebelumnya saat latihan dasar kemiliteran”.

c. Pembinaan Kondisi Sosial

Pembinaan kondisi sosial yang digelar oleh jajaran Kodam III/Siliwangi meliputi pembinaan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembinaan ideologi mencakup pendataan, pencatatan, dan analisis tentang kelompok / organisasi terlarang di tengah masyarakat, seperti PKI yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pembinaan politik dilakukan dengan memetakan peta kekuatan politik, partai politik, jumlah pengurus dan anggota partai politik, dan proses pilkada yang berjalan selama ini. Pembinaan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM, jumlah perusahaan daerah, perusahaan nasional, BUMN, BUMS, BUMD, maupun industri di wilayahnya masing-masing. Pembinaan sosial budaya mencakup pemetaan dan analisis terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, angkatan kerja, tingkat pendidikan, sampai dengan budaya, hukum adat, kearifan lokal, maupun seni budaya lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.

Wawancara dengan Asisten teritorial (Aster) Kodam III/Siliwangi, Kolonel Arh Hasto Respatyo, secara eksplisit menegaskan bahwa jajaran aparat teritorial Kodam III/Siliwangi senantiasa melakukan analisa, prediksi, dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis, khususnya kondisi ideology, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Setiap aparat teritorial menyusun skenario, simulasi, cara bertindak dan mengantisipasi

resiko terburuk situasi dan kondisi di tengah masyarakat dengan cara memetakan berbagai konstelasi yang berkembang dengan berbekal pendataan, pemetaan, dan pencatatan pembinaan kondisi sosial. Lebih lanjut, berikut adalah kutipan wawancara dengan Aster Kodam III/Siliwangi:

“Sebagai aparat teritorial, personil Kodam III/Siliwangi selalu melakukan analisa situasi, menyusun prediksi, dan rencana antisipasi serta membuat simulasi dan scenario terhadap perkembangan lingkungan strategis di tengah masyarakat. Dinamika kondisi sosial yang dinamis dianalisis, dibedah, dan diurai secara cermat oleh aparat teritorial di Korem, Kodim, dan Koramil sehingga dapat menjadi bekal untuk membuat rencana kontijensi, cara bertindak, maupun prediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, dilakukan pendataan, pemetaan, dan pencatatan terhadap kondisi sosial, berupa ideology, politik, sosial budaya, dan ekonomi, sebagai bahan dalam membuat prediksi antisipasi, scenario, simulasi, maupun rencana kontijensi. Analisis intelijen aparat teritorial harus mampu meneropong dan membedah dinamika sosial yang berpotensi menjadi ancaman baik factual maupun potensial”.

Implementasi Metode Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi

Dalam melaksanakan pembinaan teritorial, diperlukan metode atau cara atau teknik yang tepat sehingga akan dapat diterima oleh semua komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula yang dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi yang senantiasa berupaya untuk menerapkan metode pembinaan teritorial secara cepat dan efektif melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI, sebagai berikut:

a. Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial yang dikembangkan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi dalam menggelar pembinaan teritorial dilakukan melalui anjangsana, silaturahmi, komunikasi, koordinasi, penyuluhan, pembimbingan, dan pengarahan kepada semua komponen masyarakat, pelaku dunia usaha, komunitas industry, maupun aparat pemerintahan daerah, pegawai ASN/PNS, komunitas perbankan, dan kalangan sekolah atau kampus. Materi yang disosialisasikan adalah berkenaan dengan pendidikan kesadaran bela Negara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan militansi bangsa kepada masyarakat maupun semua pihak terkait.

Tabel 2. Kegiatan Komunikasi Sosial Kodam III/Siliwangi Tahun 2019-2020

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019	Tahun 2020 (S.d. Juli 2020)
1	Sosialisasi Bela Negara	31	16
2	Penyuluhan Bela Negara	42	25
3	Pembimbingan Masyarakat	29	18
4	Rakor Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Propinsi	12	7
5	Rakor FKPT (Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme) Propinsi	9	6
6	Rakor FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Propinsi	10	8
7	Rakor FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Propinsi	11	7

Sumber : Laporan Sisrendal Binter Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020

b. Pembinaan Ketahanan Wilayah

Pembinaan ketahanan wilayah yang diselenggarakan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi melalui pelatihan bela Negara maupun pelatihan dasar kemiliteran kepada organisasi kepemudaan, organisasi Pramuka, Linmas, Ratih, Kamra, Polsus, Hansip, satpam, Menwa, Tagana, Karang Taruna, OSIS, maupun organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam BEM maupun UKM, yang bertujuan menumbuhkan semangat juang, disiplin, militansi, maupun karakter pejuang kepada para generasi penerus bangsa sebagai pilar dalam melanjutkan perjalanan bangsa. Semua organisasi di tengah masyarakat ini nantinya disiapkan, dididik, dilatih, dan dibina untuk menjadi komponen cadangan jika berminat dan juga komponen pendukung apabila bersedia, sehingga dapat dilakukan mobilisasi saat terjadinya perang maupun menghadapi ancaman lainnya.

Tabel 3. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah Kodam III/Siliwangi
Tahun 2019-2020

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019	Tahun 2020 (S.d. Juli 2020)
1	Pelatihan Menwa	34	19
2	Pelatihan Tagana	31	16
3	Pelatihan Osis	37	18

4	Pembinaan Karang Taruna	30	20
5	Pembinaan Polsus	24	14
6	Pembinaan Linmas	28	15
7	Diklat Pramuka	21	12
8	Diklat Pecinta Alam	27	13
9	Outbound ASN/PNS	6	4

Sumber : Laporan Anpotwil Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020

c. Bhakti TNI

Bhakti TNI diterapkan oleh jajajaran Kodam III/Siliwangi melalui operasi bhakti yang meliputi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Tentara Manunggal Sosial Sejahtera (TMSS), Tentara Manunggal Keluarga Berencana (TMKB). Selain itu, digelar pula karya bhakti seperti pekan bhakti dan bulan bhakti yang dilakukan secara rutin. Kegiatan bhakti TNI dilakukan dengan membersihkan jalan, memperbaiki gorong-gorong, merehabilitasi rumah warga, membangun jembatan, maupun membersihkan fasilitas sosial, fasilitas umum, maupun fasilitas keagamaan lainnya. Bhakti TNI juga dilakukan dengan menugaskan personil TNI AD menjadi guru di wilayah pedesaan yang jarang tenaga pendidik, mengerahkan dokter TNI AD untuk melakukan bhakti sosial berupa sunatan masal, khitanan massal, operasi katarak massal maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga akan mendukung pembangunan dalam rangka TNI manunggal bersama rakyat, sehingga rakyat harus bersama-sama dengan TNI apabila TNI membutuhkan bantuan saat terjadi peperangan maupun menghadapi ancaman militer.

Tabel 4. Kegiatan Bhakti TNI oleh Kodam III/Siliwangi Tahun 2019-2020

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019	Tahun 2020 (S.d. Juli 2020)
1	TMMD	8	3
2	TMMS	12	6
3	TMKB	15	8
4	Pekan Bhakti	53	31
5	Bulan Bhakti	12	6
6	Bhakti Sosial	32	15
7	Kerja Bhakti	49	29

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Progbinter Kodam III/Siliwangi, Tahun 2020

Hambatan Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi

Hambatan yang dihadapi oleh jajaran Kodam III/Siliwangi dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menangkal hakekat ancaman adalah sebagai berikut:

a. Hambatan Internal

Pertama, hambatan personil. Belum semua personil di tingkat Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil di satuan Kodam III/Siliwangi memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keahlian yang sama tentang penyiapan potensi wilayah pertahanan, khususnya dalam pendataan, pencatatan, inventarisasi, dan pembinaan sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan Negara untuk ditransformasikan sebagai sumber daya pertahanan Negara.

Kedua, hambatan Sarana Prasarana. Sarana, prasarana, logistik, material, dan infrastruktur fisik yang dimiliki oleh komando kewilayahan mulai dari Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil di satuan Kodam III/Siliwangi masih belum mencukupi untuk pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi masyarakat untuk menjadi komponen cadangan dan pelatihan bela Negara kepada masyarakat untuk disiapkan menjadi komponen pendukung memerlukan sarana prasarana yang memadai, logistik yang kuat, dan material yang lengkap. Ketiga, adanya hambatan Anggaran. Selama ini, alokasi anggaran Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil di satuan Kodam III/Siliwangi untuk pembinaan potensi pertahanan masih sangat minim dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, sebagai akibat dari masih kecilnya anggaran pertahanan dalam APBN setiap tahunnya. Sementara itu, alokasi anggaran dalam APBD tidak ada karena urusan pertahanan dianggap sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga Kodam III/Siliwangi seringkali menggunakan dana seadanya untuk melakukan berbagai program dan kegiatan penyiapan potensi pertahanan di berbagai daerahnya masing-masing.

Ketiga, hambatan piranti lunak / sistem dan metode. Piranti lunak selama ini yang dipergunakan oleh aparat Kodam III/Siliwangi masih

belum mengadaptasi perkembangan teknologi informasi, belum menyesuaikan perkembangan jaman, dan belum mengikuti perkembangan lingkungan strategis, dimana belum ada software/aplikasi sistem informasi manajemen pembinaan teritorial, penyusunan RTRW Pertahanan juga masih dilakukan secara manual, belum menggunakan perangkat digital maupun sistem informasi geografis (*Geographical Information System, GIS*), sehingga berdampak pada pendataan potensi sumber daya alam untuk diubah menjadi kekuatan pertahanan.

b. Hambatan Eksternal

Pertama, Pemahaman Masyarakat. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kodam III/Siliwangi belum memahami tentang pertahanan Negara, hakekat ancaman Negara, maupun sumber daya pertahanan Negara. Masyarakat masih menilai bahwa urusan pertahanan adalah urusan militer dan urusan militer adalah urusan TNI, sehingga mereka menyerahkan semua hal yang berbau pertahanan Negara ke TNI. Masyarakat tidak tahu tentang komponen cadangan dan komponen pendukung yang sangat penting peran dan kontribusinya dalam mendukung komponen utama (TNI) dalam menggelar OMP dalam kerangka sistem pertahanan semesta.

Kedua, Ego Sektoral Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Kodam III/Siliwangi masih bersifat ego sektoral dan tidak berpikir komprehensif dalam urusan pertahanan Negara. Pemda menganggap bahwa bidang pertahanan keamanan adalah urusan pemerintah pusat sehingga alokasi anggaran dari pemerintah pusat dalam APBN sehingga tidak perlu ada alokasi anggaran dalam APBD. Pemda lebih cenderung memprioritaskan pembangunan daerah dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) sehingga kurang mengindahkan pendekatan keamanan (*security approach*), sehingga berdampak pada tidak sinkronnya RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Pembangunan Pemda. Padahal, dalam penataan wilayah pertahanan, memerlukan sinkronisasi antara RTRW Pertahanan Darat dari TNI AD dengan RTRW Pembangunan dari Pemda.

Ketiga, Persepsi Negatif NGO/LSM. Sebagian NGO/LSM masih mempersepsikan secara negatif tentang pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam pembinaan teritorial yang diperankan oleh Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil di wilayah Kodam III/Siliwangi. Bahkan, banyak aktivis NGO yang tidak paham dengan Binter dengan terus menghembuskan agar supaya fungsi Binter TNI AD dihapuskan. Padahal, fungsi binter TNI AD adalah menstranformasikan potensi pertahanan menjadi sumber daya pertahanan yang dapat dikerahkan untuk mendukung OMP dalam menghadapi ancaman militer. Keberadaan Binter merupakan konsekuensi logis dari sistem pertahanan semesta yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Formulasi Strategi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi

Dalam menghadapi hambatan yang dihadapi pada penyelenggaraan pembinaan teritorial, diperlukan formulasi strategi yang harus dilakukan oleh semua jajaran Kodam III/Siliwangi sebagai berikut:

Pertama, Strategi di Bidang Personil. Memberikan sosialisasi, pelatihan, pemahaman, pembinaan, dan pengarahan kepada semua personil TNI AD yang ada di Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil yang bertugas melakukan pembinaan teritorial tentang berbagai pengetahuan, konsep, teori, praktek, dan simulasi penyiapan potensi pertahanan untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan di wilayahnya masing-masing. Personil TNI AD yang ada di satuan komando kewilayahan harus mampu melakukan metode binter baik bintahwil, komsos, maupun bhakti TNI melalui berbagai komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai instansi lintas sektoral agar mendukung program dan kegiatan TNI AD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan melalui metode Binter.

Kedua, Strategi di Bidang Sarana Prasarana. Melengkapi, memperbarui, dan memodernisasi segala peralatan, perlengkapan, pangkalan, infra struktur fisik, logistik, material, maupun peralatan khusus lainnya yang ada di satuan komando kewilayahan TNI AD, baik Kodam, Korem, Kodim, maupun Koramil, agar supaya mendukung berbagai program dan kegiatan pembentukan komponen cadangan, penataan komponen

pendukung, pembinaan kesadaran bela Negara (PKBN), maupun berbagai kegiatan Binter lainnya untuk menyiapkan segala sumber daya nasional menjadi sumber daya pertahanan untuk mendukung gelar OMP.

Ketiga, Strategi di Bidang Anggaran. Meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan wilayah pertahanan di setiap Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil sesuai kebutuhan dan daftar skala prioritas serta berpegang teguh pada prinsip anggaran berbasis kinerja (ABK) sehingga akan mendukung program dan kegiatan Binter TNI AD untuk mengelola dan membina SDM, SDA, SDB, dan sarana prasarana nasional untuk diubah menjadi sumber daya pertahanan.

Keempat, Strategi di bidang piranti lunak/sistem dan metode. Mengadaptasi perkembangan teknologi informasi di era revolusi industry 4.0 dengan membuat website resmi pada Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil untuk mensosialisasikan program dan kegiatan pembinaan teritorial. Pembuatan akun media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube, blog, vlog) pada setiap Korem, Kodim, dan Koramil untuk media sosialisasi, komunikasi, penyuluhan, dan jaringan komunitas dalam berbagi informasi terkini sangat penting dikembangkan. Digitalisasi pendataan potensi pertahanan di tengah masyarakat juga mutlak dilakukan agar supaya tidak ketinggalan jaman dan mengikuti perkembangan di tengah masyarakat.

Kelima, Strategi Untuk Masyarakat. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembimbingan, pembinaan, dan penataran kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh intelektual, ormas, OKP, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya di tengah masyarakat tentang program dan kegiatan penyiapan potensi wilayah pertahanan, pentingnya pembentukan komponen pendukung, mendesaknya dibangun komponen cadangan, dan kewajiban untuk mengikuti pendidikan bela Negara untuk menyadarkan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib untuk bela Negara melalui berbagai jalur yang ada.

Keenam, Strategi Untuk Pemda. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua unsur yang ada di jajaran pemerintah daerah,

baik pemda Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi RTRW Pertahanan Darat yang dimiliki oleh Kodam, Korem, dan Kodim, dengan RTRW Pembangunan yang dibuat oleh Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kota. Perlu adanya pemahaman terhadap semua pemangku kepentingan di pemerintahan daerah dan DPRD tentang adanya dokumen perencanaan wilayah pertahanan di setiap wilayah, baik daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang, yang didalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan yang kesemuanya itu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Ketujuh, Strategi Untuk NGO/LSM. Melakukan sosialisasi, diskusi, dan dialog untuk memberikan kesadaran bahwa tugas pokok TNI AD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan maupun pembinaan teritorial di setiap daerah oleh Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil merupakan amanat dari UUD NRI 1945, UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan UU PSDN yang sah dan konstitusional sehingga tidak ada alasan untuk tidak setuju ataupun menentang semua program dan kegiatan TNI AD dalam penyiapan potensi wilayah pertahanan menjadi kekuatan pertahanan.

Gagasan Inovasi Pembinaan Teritorial Di Kodam III/Siliwangi

Melihat implementasi pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi selama ini, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang ditempuh, maka lahir sebuah ide, gagasan, dan terobosan kreatif sebagai sebuah *novelty* (kebaruan atau keaslian atau originalitas) dari penelitian ini berikut ini:

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertahanan (AMDAL HAN).

Dalam doktrin strategi pertahanan semesta, terdapat daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang yang didalamnya terdapat daerah pangkal perlawanan sebagai tumpuan untuk melakukan perlawanan wilayah secara total dalam menghadapi musuh, sehingga diperlukan penyiapan RAK Juang. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan wilayah pertahanan yang dituangkan dalam RTRW Pertahanan Darat yang akan membagi wilayah berdasarkan hakekat ancaman dan gelar peperangan untuk menghadapinya.

Penataan tempat atau wilayah sebagai ruang juang dapat dilaksanakan sejak dini, sebagai contoh: Dinas PU dalam organisasi Pemda merancang pembangunan jalan, seyogyanya rancangan tersebut disentuh dengan aspek pertahanan sehingga bila terwujud maka pada kondisi darurat/perang dapat difungsikan sebagai landasan pesawat udara. Contoh lain : Pembangunan gedung bertingkat, seyogyanya mengandung aspek pertahanan dengan membangun tempat parkir basement secara bertingkat ke bawah sehingga memberikan keuntungan pada aspek ekonomi dan pertahanan. Di samping penghematan tempat dapat juga difungsikan sebagai bunker tempat perlindungan pengungsi bila pada kondisi darurat maupun Negara dalam keadaan perang.

Berdasarkan hal itu, maka diperlukan “Amdal Pertahanan”, dimana setiap perijinan sarana prasarana, pendirian bangunan, pembangunan gedung, perijinan pabrik, maupun berbagai infra struktur fisik lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, pengembang, pengusaha, maupun pihak lain, selain meminta ijin ke pemerintah / pemda, harus pula melalui perijinan dari Kodam untuk dikeluarkan Amdal Pertahanan. Kodam akan mengeluarkan ijin Amdal Pertahanan kepada semua pihak yang mengajukan pembangunan sarana prasarana fisik setelah melalui studi kelayakan dan pengecekan dalam dokumen RTRW Hanrat sehingga sarana prasarana yang dibangun memang sudah layak atau memenuhi unsur pertahanan.

Dalam konteks ini, Kodam sebagai pihak yang mengeluarkan ijin Amdal Pertahanan harus meningkatkan kualitas dan kompetensi pelayanan perijinan, dimana kecepatan pelayanan perijinan, kemudahan pelayanan perijinan, dan keterbukaan pelayanan perijinan harus menjadi prinsip utama sehingga dapat menghindari anggapan bahwa perijinan berupa Amdal Pertahanan mempersulit iklim usaha / pelaku usaha, dan menghambat pembangunan daerah.

b. Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIM BINTER).

Dalam pengelolaan data potensi pertahanan dan data teritorial, sudah saatnya satuan komando kewilayahan, khususnya Kodam

mengembangkan data base (data dasar / data induk) secara digital sehingga memudahkan dalam proses pencarian, pengelompokan, penyajian, maupun sebagai bahan masukan pimpinan untuk pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Selama ini, data potensi pertahanan dan data teritorial yang ada di Kodam masuk bersifat manual baik data geografi, data demografi, maupun data kondisi sosial. Data-data tersebut terdapat dalam laporan satuan teritorial, Analisa Daerah Operasi (ADO), maupun laporan satuan lainnya yang kadangkala jarang sekali *di-update* atau diperbarui, sehingga ketika ditanyakan oleh pimpinan satuan berapa data jumlah Menwa di wilayah Kodam X misalnya, maka agak sulit dan agak lama untuk mencarinya.

Oleh karena itu, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIM Binter) yang dirancang melalui *software* digital dengan penyajian yang rapi, mudah untuk mengakses, masuk dengan *log in* dan *password* tertentu, dan didukung oleh jaringan pengamanan yang kuat oleh ahli IT atau ahli Siber TNI AD, sehingga setiap data yang diperlukan, khususnya data teritorial mudah disajikan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

SIMPULAN

Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ancaman militer, ancaman non militer, dan ancaman hibrida yang mendorong disusunnya strategi pertahanan semesta, melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini, melalui pendidikan kesadaran bela Negara dan pelatihan dasar kemiliteran, sehingga mampu mendukung komponen utama (TNI) dalam menggelar operasi militer untuk perang (OMP) menghadapi ancaman musuh. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan potensi pertahanan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan dengan menggelar pembinaan teritorial TNI AD untuk menstransformasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional menjadi sumber daya pertahanan

dan kekuatan pertahanan yang siap digerakan ketika Negara dalam keadaan perang.

Pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi belum sepenuhnya optimal baik dilihat dari fungsi pembinaan teritorial (pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial) maupun metode pembinaan teritorial (komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI). Hambatan yang dihadapi Kodam III/Siliwangi dalam menggelar pembinaan teritorial adalah hambatan internal (personil, materiil, anggaran, piranti lunak) dan hambatan eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO/LSM). Formulasi strategi pembinaan teritorial yang dilakukan meliputi sosialisasi, komunikasi, koordinasi, penyuluhan, pembimbingan, penganggaran, pengadaan, dan pelatihan. Adapun gagasan inovasi sebagai *novelty* / kebaruan penelitian ini adalah dirumuskannya “Amdal” Pertahanan dan SIMBINTER TNI AD.

Rekomendasi yang dapat diusulkan adalah mengingat urusan pemerintahan absolut yang dimiliki oleh Kemhan/TNI tidak didelegasikan, yakni urusan Pertahanan Keamanan, maka untuk memudahkan dalam koordinasi perlu adanya surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri menyangkut kerja sama pengelolaan potensi pertahanan dan pembinaan teritorial sehingga antara komando kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, Koramil) dan pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban bersama-sama dalam menyiapkan potensi pertahanan negara dan pembinaan teritorial di daerah. Selain itu, perlu pula pemerintah untuk segera membuat aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari UU No 23 Tahun 2019 Tentang PSDN sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dan petunjuk teknis di lapangan bagi TNI, khususnya TNI AD, terutama Komando Kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil) dalam melaksanakan penyiapan potensi wilayah pertahanan / pembinaan teritorial dalam rangka penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, B. (1991). *People, State and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Harvester Wheatsheaf.
- Herdiansah, A. G. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Lebak. *Jurnal Cosmogov*, 65-82.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan RI*. Jakarta.
- Kodam III/Siliwangi. (2020). *Laporan Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil)*. Bandung: Kodam III/Siliwangi.
- Kodam III/Siliwangi. (2020). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Teritorial (Progbinter)*. Bandung: Kodam III/Siliwangi.
- Kodam III/Siliwangi. (2020). *Laporan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembinaan Teritorial (Sisrendal Binter)*. Bandung: Kodam III/Siliwangi.
- Mabes TNI AD. . (2017). *Buku Petunjuk Teritorial*. Jakarta.
- Miles, M. B. (2013). *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publication.
- Nainggolan, P. P. (2014). Terorisme dan Perspektif Keamanan Pasca Perang Dingin. *Jurnal Analisis CSIS*, 19-35.
- Perwita, A. A. (2014). Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia. . *Jurnal Analisis CSIS*, 44 – 62.
- Possen, B. (1994). *The Source of Military Doctrine*. Ithaca : Cornell University Press.
- Pusterad. (2020). *Optimalisasi Penyiapan Potensi Wilayah Pertahanan Melalui Binter Yang Sesuai Perkembangan Lingkungan*. Jakarta.
- Salman, A. (2018). Penyiapan Potensi Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. *Jurnal Agregasi*, 17-35.
- Siregar, R. S. (2019). Implementasi Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS Dalam Mencegah Radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 61-80.
- Stephan, A. (1971). *The Military in Politics : Changing Patterns in Brazil* . Princeton: Princeton University Press.

- Subagyo, A. (2016). Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. *Jurnal Agregasi Unikom*, 1-17.
- Subianto, L. H. (2013). Konsep Human Security : Tinjauan dan Prospek. *Jurnal Analisis CSIS*, 31(1), 21-38.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujito, A. d. (2012). *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Susetyo, E. (2019). Operasi Militer Selain Perang dan Pembinaan Teritorial TNI AD di Kabupaten Bandung. *Jurnal JIPSI*, 4(2), 1-18.
- Tippe, S. &. (2016). *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Bandung: PT Alfabeta.
- Vermonte, P. J. (2014). Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya. *Jurnal Analisis CSIS*, 31(1), 1-20.